



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDWIN NUGRAHA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KAWASANTAMAN HUTAN RAYA BANTEN
3. NHK : 815700

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m²/114 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 72 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 159.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU GMREJ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA FIC02N28 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.800.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 42.394.229

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 871.694.229

III. HUTANG Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 796.694.229

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.